



PERMUKIMAN LIAR

Pemprov DKI Segera Tertibkan Hunian Kolong Tol JIUT

Selasa, 7 Mei 2013

JAKARTA (Suara Karya): Pemprov DKI Jakarta segera menertibkan hunian ilegal di kolong jalan tol, Jakarta Intra Urbans Toll (JIUT), khususnya di kawasan Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Barat. Puluhan bangunan semipermanen yang kumuh berdiri di sana, sehingga rawan terjadi kebakaran yang dapat membahayakan struktur bangunan jalan tol.

"Saya minta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera menertibkan hunian kumuh di bawah kolong tol di Jembatan Tiga. Kita tidak akan membiarkan hunian itu tambah marak. Jika dibiarkan, permukiman warga di sana mengundang kerawanan. Kalau sampai terjadi kebakaran, berpotensi merusak bangunan jalan tol. Itu membahayakan," ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kemarin.

Sebelum permukiman itu ditertibkan, Pemprov DKI telah menyiapkan rumah susun (rusun) di Marunda untuk menampung warga penghuni kolong tol Jembatan Tiga.

"Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI sejak awal 2013 telah memperbaiki ratusan rusun di Marunda. Jika sudah selesai direhab, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat segera melakukan sosialisasi kepada warga untuk pindah ke rusun," kata Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama.

Lebih lanjut Ahok menegaskan, warga eks penghuni kolong tol yang ber-KTP DKI tidak dikenai biaya untuk menghuni rusun Marunda. Bahkan tiga bulan pertama, mereka tidak dibebani sewa. "Warga yang punya pekerjaan di wilayah Jembatan Tiga disubsidi biaya transpornya dari Marunda ke Jembatan Tiga pergi-pulang," katanya menambahkan.

Setelah ditertibkan, area eks hunian kumuh di kolong tol itu akan dimanfaatkan untuk parkir sepeda motor dan sebagian lagi dijadikan taman kota. "Area yang dimanfaatkan untuk parkir itu hanya yang berdekatan dengan halte bus Transjakarta.

Kalau tersedia tempat parkir yang baik dan terjangkau, warga akan meninggalkan motornya di sana, kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan busway," tutur Ahok, mantan Bupati Belitung Timur.

Sebenarnya, pengelola jalan tol JIUT pernah mengkaji optimalisasi area bawah tol dibangun jalan arteri baru. Ini juga untuk menambah luas jalan tanpa membebaskan lahan, tetapi hal itu sulit diwujudkan.

"Lahan itu menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga kita tidak bisa membangun jalan untuk menambah ruas jalan arteri. Di samping itu, area kolong tol tidak terlalu maksimal untuk dimanfaatkan sebagai jalan arteri," katanya lagi.

Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI, Zainudin MH, mendukung penertiban area permukiman kumuh di bawah tol JIUT. Tugas Pemprov DKI dan jajarannya adalah meyakinkan penghuni agar mau ditertibkan dan pindah ke rusun.

"Dewan mendukung penuh penertiban permukiman kumuh kolong tol. Yang perlu diperhatikan, warga Jakarta dipindah ke rusun agar mereka menempati hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman," kata Zainudin MH. (Yon Parjiyono)